



ANNUAL MEETINGS
2018 indonesia
INTERNATIONAL MONETARY FUND
WORLD BANK GROUP



Peran BKPM dalam Percepatan Kemudahan Berusaha di Indonesia



Improving Ease of Doing Business Through Public Engagement

International Business Integrity Conference (IBIC), 5 Desember 2018



KEMUDAHAN BERUSAHA INDONESIA 2019

No.	10 Indikator <i>Ease of Doing Business</i>	DTF Score		Ranking	
		2018	2019	2018	2019
	Total	66,47	67,96	72	73
1	Starting A Business	77,93	81,22	144	134
2	Dealing With Construction Permit	66,08	66,57	108	112
3	Registering Property	59,01	61,67	106	100
4	Getting Electricity	83,87	86,38	38	33
5	Paying Taxes	68,04	68,03	114	112
6	Getting Credit	65,00	70,00	55	44
7	Protecting Minority Investor	63,33	63,33	44	51
8	Trading Across Borders	66,59	67,27	112	116
9	Enforcing Contract	47,23	47,23	145	146
10	Resolving Insolvency	67,61	67,89	38	36



REFORM INDONESIA DALAM DB2019



Starting a Business

integrasi pendaftaran BPJS melalui portal tunggal, penurunan tarif notaris, SIUP dan TDP elektronik via SSW



Registering Property

Peningkatan transparansi informasi dan efisiensi dalam administrasi, pengurangan waktu penyelesaian sengketa tanah di pengadilan tingkat pertama,



Getting Credit

Perbaikan distribusi informasi perkreditan dengan penyampaian data informasi konsumen oleh perusahaan utilitas kepada LPIP

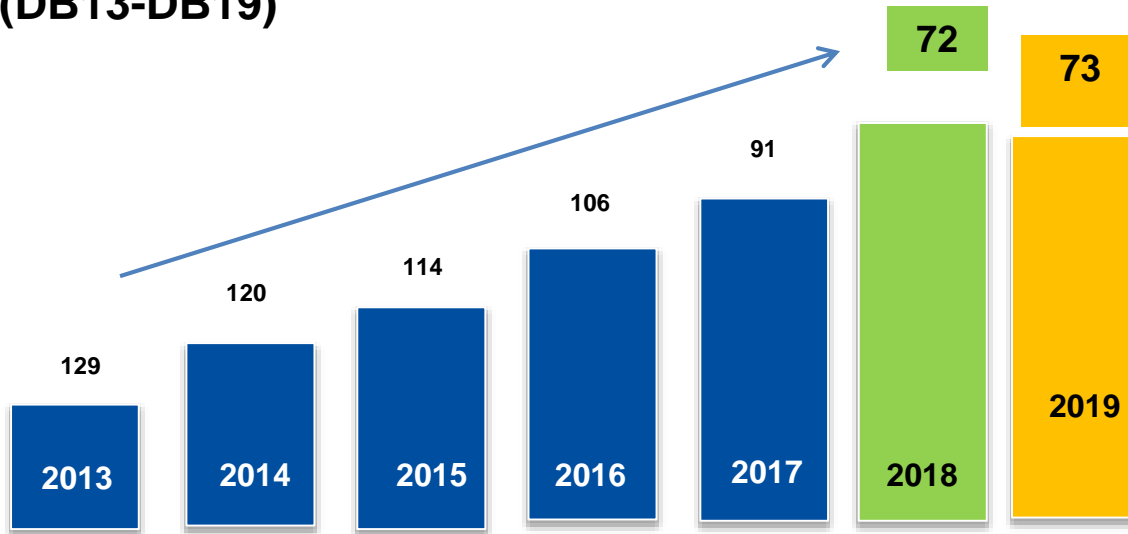
- **DTF Score EODB:** 7 Indikator naik, 3 yang relative tetap
- **Ranking EODB:** 6 indikator naik, 4 turun

Snapshot Temuan Doing Business 2019 untuk Indonesia

INDONESIA		East Asia & Pacific		GNI per capita (US\$)	
Ease of doing business rank (1–190)	73	Ease of doing business score (0–100)	67.96	Population	3,540 263,991,379
✓ Starting a business (rank)	134	✓ Getting credit (rank)	44	Trading across borders (rank)	116
Score for starting a business (0–100)	81.22	Score for getting credit (0–100)	70.00	Score for trading across borders (0–100)	67.27
Procedures (number)	10	Strength of legal rights index (0–12)	6	Time to export	
Time (days)	19.6	Depth of credit information index (0–8)	8	Documentary compliance (hours)	61.3
Cost (% of income per capita)	6.1	Credit bureau coverage (% of adults)	38.1	Border compliance (hours)	53.3
Minimum capital (% of income per capita)	0.0	Credit registry coverage (% of adults)	58.2	Cost to export	
				Documentary compliance (US\$)	138.8
Dealing with construction permits (rank)	112	Protecting minority investors (rank)	51	Border compliance (US\$)	253.7
Score for dealing with construction permits (0–100)	66.57	Score for protecting minority investors (0–100)	63.33	Time to import	
Procedures (number)	17	Extent of disclosure index (0–10)	10	Documentary compliance (hours)	106.2
Time (days)	200.1	Extent of director liability index (0–10)	5	Border compliance (hours)	99.4
Cost (% of warehouse value)	4.4	Ease of shareholder suits index (0–10)	2	Cost to import	
Building quality control index (0–15)	13.0	Extent of shareholder rights index (0–10)	7	Documentary compliance (US\$)	164.4
		Extent of ownership and control index (0–10)	7	Border compliance (US\$)	382.6
Getting electricity (rank)	33	Extent of corporate transparency index (0–10)	7		
Score for getting electricity (0–100)	86.38	Paying taxes (rank)	112	Enforcing contracts (rank)	146
Procedures (number)	4	Score for paying taxes (0–100)	68.03	Score for enforcing contracts (0–100)	47.23
Time (days)	34	Payments (number per year)	43	Time (days)	403.2
Cost (% of income per capita)	252.8	Time (hours per year)	207.5	Cost (% of claim value)	70.3
Reliability of supply and transparency of tariffs index (0–8)	5.8	Total tax and contribution rate (% of profit)	30.1	Quality of judicial processes index (0–18)	7.9
		Postfiling index (0–100)	68.82		
✓ Registering property (rank)	100			Resolving insolvency (rank)	36
Score for registering property (0–100)	61.67			Score for resolving insolvency (0–100)	67.89
Procedures (number)	5			Time (years)	1.1
Time (days)	27.6			Cost (% of estate)	21.6
Cost (% of property value)	8.3			Recovery rate (cents on the dollar)	65.2
Quality of land administration index (0–30)	14.5			Strength of insolvency framework index (0–16)	10.5

Indonesia **on the track** secara kontinyu terus melakukan upaya reformasi perbaikan kemudahan berusaha. Peringkat EODB Indonesia **naik 57 peringkat** dalam 5 tahun terakhir, dan turun 1 peringkat EODB 2019

Perkembangan Peringkat Ease of Doing Business Indonesia (DB13-DB19)




Source: World Bank - Doing Business Report

Kompetisi Regional






Economies	2017	2018	2019
Malaysia	23	24	15
Thailand	46	26	27
China	78	78	46
Vietnam	82	68	69
Indonesia	91	72	73
India	130	100	77
Philippines	99	113	124
Cambodia	131	135	138
Laos	139	141	154
Myanmar	170	171	171

Perbandingan Indonesia dengan Negara ASEAN dan BRIC dalam DB2019

Negara ASEAN

Country	DB 2018		DB 2019
 Singapore	2	=	2
 Malaysia	24	↑	15
 Thailand	26	↓	27
 Brunei	56	↑	55
 Vietnam	68	↓	69
 Indonesia	72	↓	73
 Philippines	113	↓	124
 Lao PDR	141	↓	154

Negara BRIC

Country	DB 2018		DB 2019
 Russia	35	↑	31
 Indonesia	72	↓	73
 China	78	↑	46
 India	100	↑	77
 Brazil	125	↑	109

Sumber: Doing Business 2019 Report

- India dan China termasuk dalam **10 Most Notable Improvement Economies** dalam DB2019, dengan perbaikan pada masing-masing 6 dan 7 Indikator, sementara Brazil berhasil melakukan perbaikan pada 4 Indikator.
- Negara BRIC berhasil melakukan perbaikan pada Indikator *Getting Electricity* dan *Trading Across Borders* sementara Negara ASEAN seperti Malaysia dan Thailand berhasil melakukan perbaikan pada Indikator *Starting a Business* dan *Trading Across Borders*.



PERAN BKPM DALAM SATGAS

- *Satgas Percepatan Berusaha*
- *Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi, Pokja IV*
- *Satgas Waspada Investasi*

16 Paket Kebijakan Ekonomi



Sistem UMR yang lebih terprediksi



Insentif pajak untuk industri padat karya



Pengurangan waktu Dwelling time



Daftar negative investasi yang lebih terbuka



Kebijakan kemudahan entry visa



Insentif untuk industri transportasi



Percepatan pengembangan infrastruktur dan pembangkit listrik



Layanan perizinan 3 jam di BKPM



Tarif listrik yang lebih rendah untuk industri



Insentif pajak untuk properti



Percepatan perizinan tanah

EODB

Ease of Doing Business Improvement



Perumahan terjangkau untuk rakyat

e-commerce

Insentif untuk pengembangan e-commerce

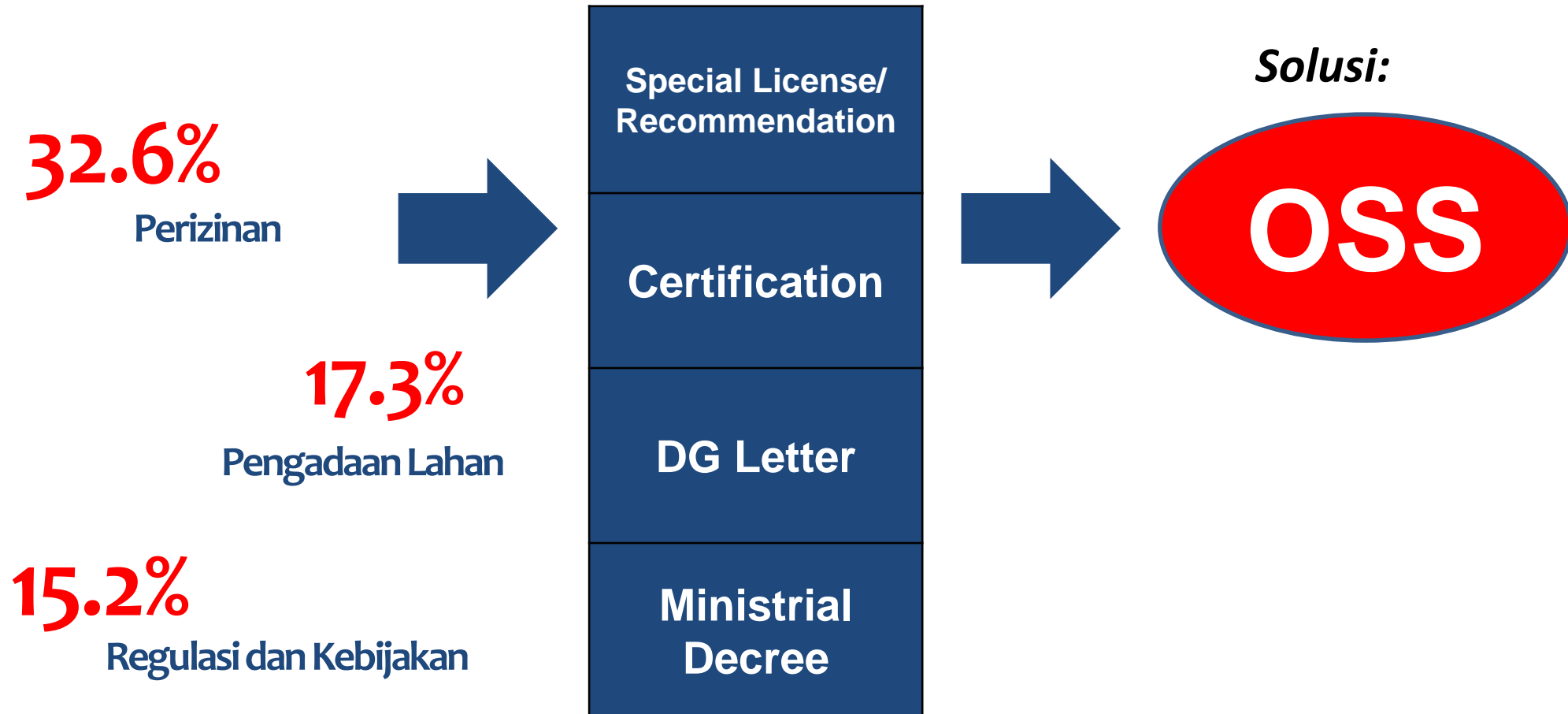
Logistik OSS

Dokumen elektronik melalui INSW dan Penurunan biaya logistik

Percepatan Pelaksanaan Beusaha

Tantangan Investasi

Berdasarkan dari **190 kasus investasi** pada POKJA 4 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, faktor penghambat investasi utama adalah:





PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 91 TAHUN 2017
TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN
BERUSAHA

TAHAP 1

PEMBENTUKAN SATGAS K/L/P:

- mengidentifikasi seluruh perizinan kegiatan sektor
- mengawal dan menyelesaikan hambatan perizinan

Penerapan komitmen penyelesaian perizinan atau pemenuhan standar di KEK, FTZ, Kawasan Industri, KSPN* yang telah beroperasi

Penerapan *Data Sharing* untuk perizinan

TAHAP 2

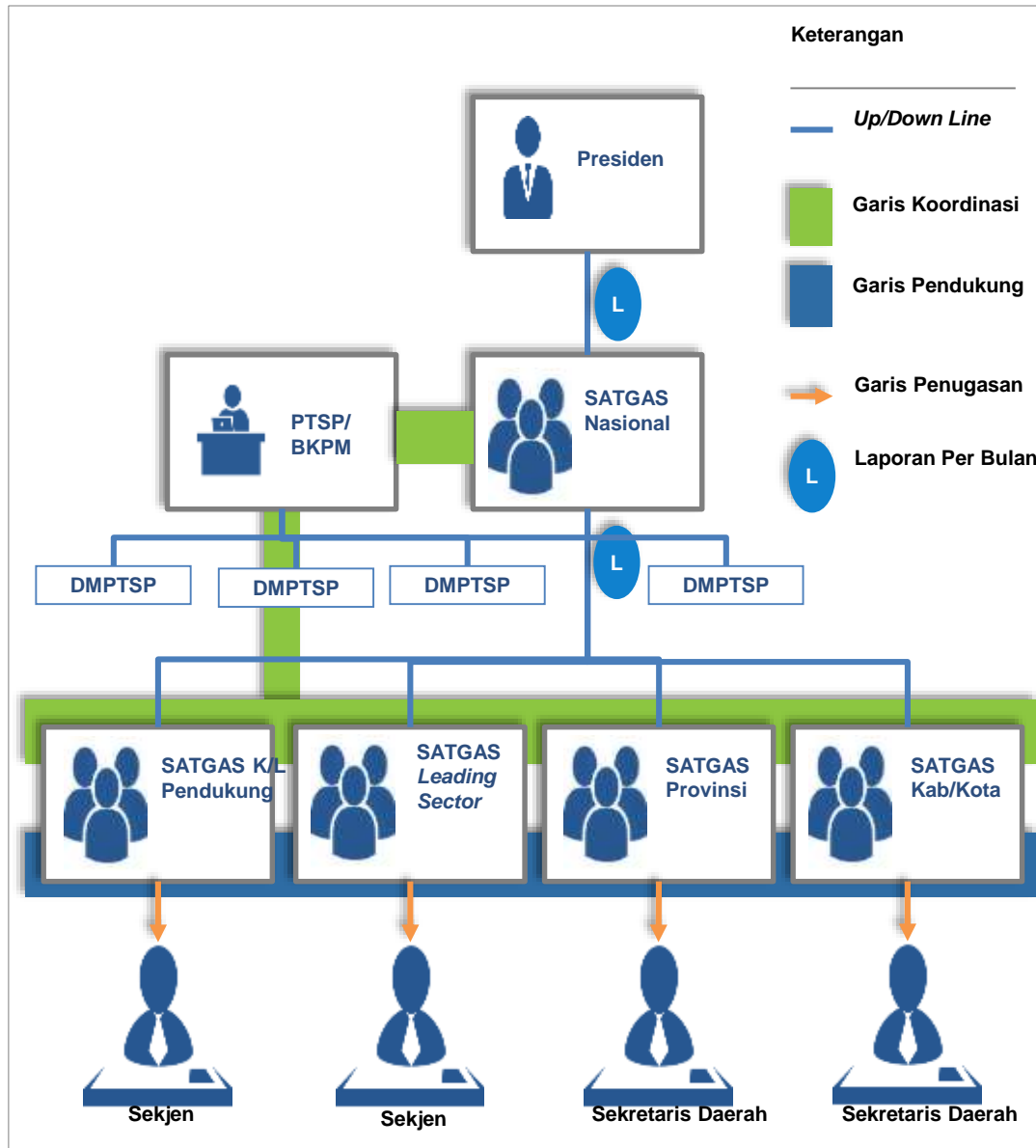
REFORMASI REGULASI di Pusat dan Daerah

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)*

Catatan: Tahap II berjalan paralel dengan Tahap I

*) KSPN: Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

Struktur Satuan Tugas Perpres No. 91 Tahun 2017

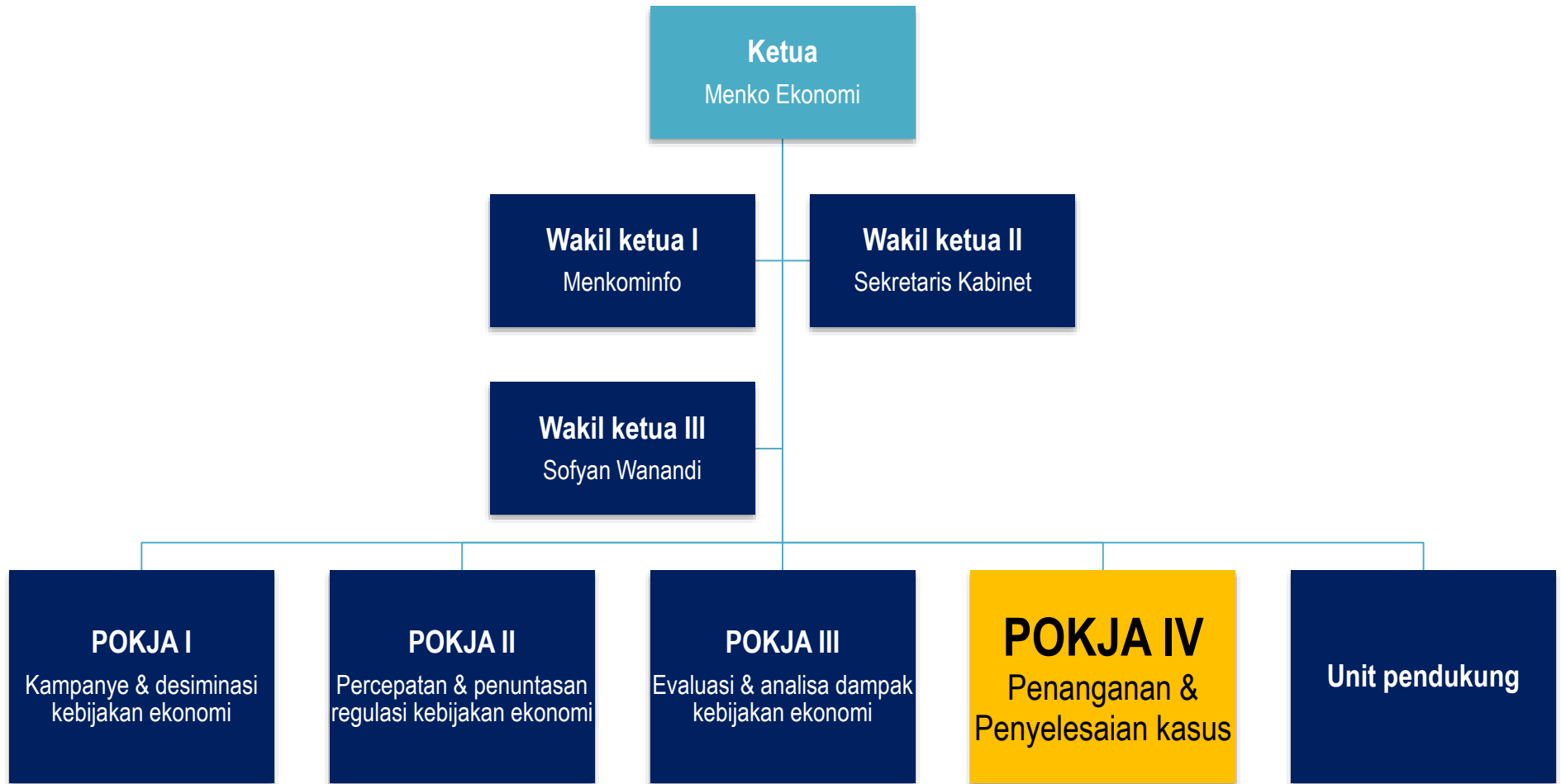


- **SATGAS Nasional** bertanggung jawab penuh terhadap pemantauan proses perizinan berusaha dan wajib melapor setiap bulan kepada Presiden.
- SATGAS K/L, Provinsi, Kab/Kota **Wajib:** (1) mengawal dan membantu penyelesaian setiap perizinan berusaha; (2) mengidentifikasi perizinan yang perlu direformasi (dimudahkan atau distandarkan); dan (3) melaporkan semua kegiatan berusaha dan permasalahannya kepada **SATGAS Nasional**.
- **SATGAS *Leading Sector*** adalah SATGAS yang paling bertanggung jawab terhadap pembinaan, pengembangan, dan pelayanan perizinan berusaha suatu sektor atau urusan.
- **SATGAS Pendukung** adalah SATGAS yang wajib mendukung perizinan yang diperlukan oleh *Leading Sector* untuk penyelesaian suatu investasi/berusaha.

Pemerintah	SK SATGAS Percepatan Pelaksanaan Berusaha				
	Jumlah	Sudah Selesai	%	Dalam Proses	%
Provinsi	34	34	100	0	0
Kabupaten	416	364	87,50	52	12,50
Kota	98	94	95,92	4	4,08
TOTAL	548	492	89,78	56	10,22

- Instruksi Presiden No. 12 tahun 2015 tentang Peningkatan Daya Saing Industri, Kemandirian Industri, & Kepastian Usaha
- Keputusan Menko Perekonomian Nomor 100 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi

Struktur Satuan Tugas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi





Μεταξύ των οποίων μετρίμην οι βεβαιώσεις εξαγωγών
δασμάτων και οι τρέχουσες μεταφορές εξαγωγών
και οι εκπτώσεις

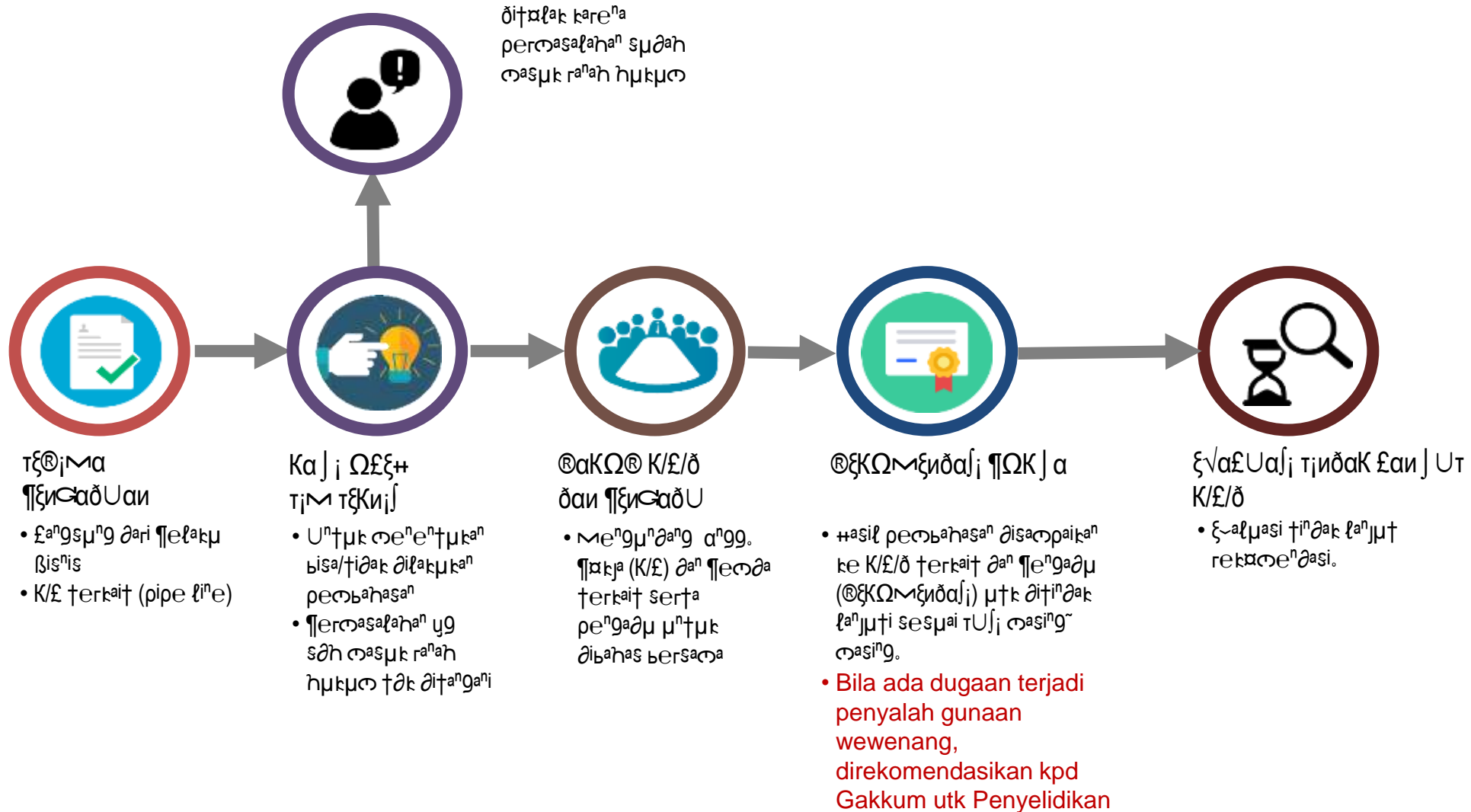


Μεταξύ των οποίων μετρίμην οι τρέχουσες μεταφορές
και οι εκπτώσεις



Μεταξύ των οποίων μετρίμην οι εκπτώσεις και
τα δασμάτια των οποίων μετρίμην οι τρέχουσες μεταφορές
και οι εκπτώσεις

Mekanisme Penanganan Kasus



295

KASUS DITERIMA :

Perusahaan : Regulasi – Birokrasi – Jenjeng Bisnis – Perpajakan – Perijinan – Canggih Keamanahan

10

KASUS DITOLAK :

Jenjeng Bisnis yang sudah ditangani Lembaga Penegak Hukum – tidak memenuhi kriteria

125

KASUS SELESAI DITANGANI :

nilai investasi Rp 659.944.970.000,000 (659 T)

160

KASUS DLM PROSES:

Perusahaan : Rekomendasi Proyek yang belum ditandatangani oleh K/L

- Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 01/KDK.01/2016 tanggal 1 Januari 2016

Satuan Tugas Waspada Investasi ini merupakan hasil kerjasama beberapa instansi terkait, yang meliputi :

Regulator :

[Otoritas Jasa Keuangan](#)

[Kementerian Perdagangan Republik Indonesia](#)

[Badan Koordinasi Penanaman Modal](#)

[Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia](#)

[Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia](#)

Penegak Hukum :

[Kejaksaan Republik Indonesia](#)

[Kepolisian Negara Republik Indonesia](#)

Entitas Yang Dihentikan Satgas Waspada Investasi

Tahun 2017

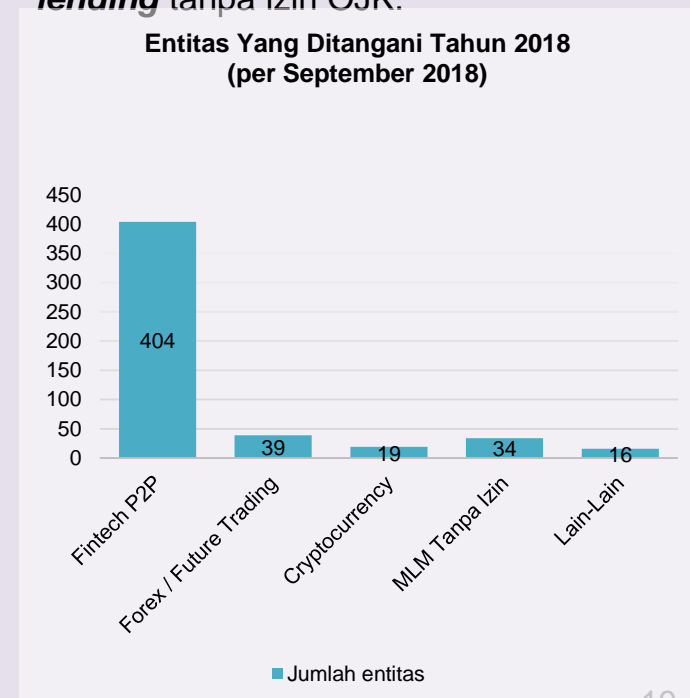
Himbauan untuk Berhati-Hati terhadap kegiatan **80 (delapan puluh) Entitas**



Lainnya: alat kesehatan, arisan online, ATM, commercial paper, distributor sabun wajah, e-commerce marketplace, entrepreneurship, investasi emas, investasi gula merah, investasi penyertaan modal, investasi pulsa, investasi sarang burung walet, investasi singkong, jasa teknologi, penitipan mobil, trading binary, transaksi digital, dan travel umrah.

Tahun 2018

Hingga September 2018, Satgas Waspada Investasi telah mengumumkan Siaran Pers untuk menghimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap **108 (seratus delapan) entitas** yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dan berpotensi merugikan masyarakat dan **404 (empat ratus empat) entitas *fintech peer-to-peer lending*** tanpa izin OJK.



Thank You
Terima Kasih

**Badan Koordinasi
Penanaman Modal
(BKPM)**

Indonesia Investment
Coordinating Board

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 44
Jakarta 12190 - Indonesia

t . +62 21 525 2008

f . +62 21 525 4945

e . info@bkpm.go.id

www.bkpm.go.id



18th ASIAN GAMES

**Jakarta
Palembang
2018**



ANNUAL MEETINGS

2018 | indonesia

INTERNATIONAL MONETARY FUND
WORLD BANK GROUP